



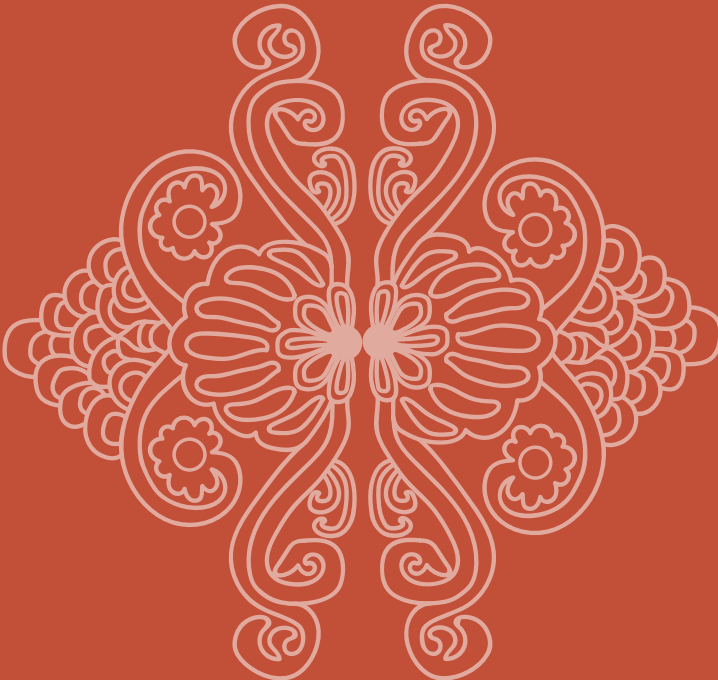
TINGALAN
JUMENENGAN DALEM

International Symposium on Javanese Culture 2025

Yogyakarta, April 12th-13th 2025

Contents

Remarks	3
Schedule	10
Yogyakarta Royal Orchestra	14
Reviewer & Editor	17
Abstract	23
Speakers Profile	44





Sambutan Pembukaan Simposium Internasional Budaya Jawa Aparatur di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Pamuji Rahayu. Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10 beserta Gusti Kanjeng Ratu Hemas,

Yang terhormat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam X beserta Gusti Putri,

Yang terhormat Duta Kerajaan Sahabat, Duta Besar, Konsul, Diplomat, Rektor, Profesor, dan Cendekiawan sekalian,

Bapak dan Ibu tamu undangan, pembicara, moderator, serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Sejak berdiri pada 13 Maret 1755 perlahan hingga sekarang, Nagari Yogyakarta secara mandiri telah menjalankan tata kelola pemerintahan. Birokrasi tersebut didukung oleh beragam aparatur dengan fungsi dan kedudukan masing-masing. Bukan hanya sekadar mengurus persoalan publik, akan tetapi sebagai pusat pemerintahan, Keraton Yogyakarta membagi aparatur negara ke dalam kelompok-kelompok spesifik seperti aparatur adat (*Abdi Dalem* yang mengurus ritual upacara, keagamaan, dan kerumahtanggaan), aparatur militer, aparatur pertanian, dan aparatur pemerintahan (peradilan, urusan patih dan kerja sama). Semua itu berakar dari falsafah *Manunggaling Kawula Gusti*, bersatunya rakyat dan pemimpin, sebuah nilai luhur yang menyokong kelestarian Kasultanan Yogyakarta hingga kini.

Abdi Dalem menjalankan beragam tugas operasional, baik domestik, teknis, maupun administratif di setiap organisasi. Saat ini, *Abdi Dalem* di Keraton Yogyakarta dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu: *Punakawan* dan *Kaprajan*. *Abdi Dalem Punakawan* merupakan *abdi* yang berasal dari kalangan masyarakat umum. Sementara *Abdi Dalem Keprajan* umumnya berasal dari kalangan TNI, Polri, dan ASN. Jenjang kepangkatannya pun keraton sesuaikan dan menjadi acuan pasca-ketiadaan aparaturnya usai pendudukan Jepang tahun 1942.

Menilik jauh ke belakang, setelah Nagari Yogyakarta berdiri, Sri Sultan Hamengku Buwono I (1755-1792) memperkuat ketahanan dan keamanan nagari dengan membentuk korps Prajurit Kasultanan Yogyakarta. Tak hanya pasukan prajurit laki-laki, pada era tersebut juga dibentuk pasukan prajurit perempuan yang berjuluk *Langen Kusuma*. Beberapa catatan bahkan menyebutkan prajurit *Langen Kusuma* cakap memainkan senjata-senjata lain, menari, dan memainkan alat musik. Mereka pun piawai dalam bercocok tanam, berdagang, serta terlibat dalam renovasi bangunan keraton, pembangunan saluran irigasi, dan pengaturan suplai logistik.

Sayangnya, akibat campur tangan pemerintah kolonial telah mereduksi keberadaan prajurit *Langen Kusuma*. Penyebab lainnya adalah berakhirnya Perang Jawa (1825-1830). Kondisi tersebut menyebabkan perubahan sistem kepemimpinan serta hilangnya fungsi kemiliteran di Keraton Yogyakarta. Faktor lain yang tak kalah penting adalah melemahnya keuangan keraton akibat perang berkepanjangan. Tidak ada lagi anggaran untuk menghidupi korps perempuan, apalagi dalam jumlah besar. Secara khusus prajurit spesial ini diulas pada hari pertama simposium.

Melihat hal ini dan bertepatan momentum ulang tahun penobatan atau *Tinggalan Jumengan Dalem* Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10 dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai Prameswari Dalem berdasarkan Tahun Masehi, Keraton Yogyakarta kembali menggelar Simposium Internasional Budaya Jawa yang ke-7 dengan mengusung tema "*Aparatur di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*".

Bapak dan ibu sekalian,

Tema tersebut dipilih secara khusus untuk meningkatkan pemahaman terhadap aparaturnya dan struktur pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta. Selama 2 hari, 12 – 13 April 2025, Bapak dan Ibu sekalian akan diajak menggali lebih dalam beragam dinamika aparaturnya Kasultanan Yogyakarta. Sebelum menjadi bagian dari Republik Indonesia, Kasultanan Yogyakarta merupakan institusi negara berdaulat

juga memiliki struktur organisasi, sistem penegakan hukum yang berupa *Pengadilan Surambi* dan *Pengadilan Darah Dalem*, hingga lembaga pertanahan. Turut hadir jabatan-jabatan pendukung keberlangsungan diplomasi, seperti aparatur penerjemah sebagai penyambung diplomasi antara keraton dengan pemerintah kolonial serta *Abdi Dalem Musikan* yang menjalankan fungsi protokoler sekaligus hiburan. Begitu juga dengan Abdi Dalem Keparak, sebagai tangan kanan hampir sebagian tata kelola rumah tangga keraton.

Bapak dan ibu peserta simposium,

Tidak hanya simposium, Keraton Yogyakarta juga kembali mengadakan pameran temporer bertajuk Hamongnagari: Aparatur Nagari Yogyakarta. Pameran ini dibuka hingga 17 Agustus 2025, di Kompleks Kedhaton, hadir sebagai upaya menelusuri kembali jejak sejarah dan merangkul lebih dekat ke masyarakat terkait eksistensi aparatur Nagari Yogyakarta.

Dalam pembukaan pameran pada Jumat 7 Maret 2025 lalu, dihadirkan setidaknya 15 peragaan busana Abdi Dalem dan beberapa keberadaannya sudah tereduksi, seperti Prajurit Langen Kusuma, Papatih Dalem, dan Abdi Dalem Palawija. Kami juga mengajak Bapak/Ibu untuk hadir untuk menyelami kepopuleran Aparatur Nagari Yogyakarta melalui koleksi pameran, atribut-atribut pendukung, dan narasi di setiap sudut ruang.

Mengakhiri sambutan, semoga simposium ini menjadi ruang silang pendapat dan membuka seluas-luasnya ragam peluang kajian terkait Aparatur Kasultanan Yogyakarta. Akhir kata, terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dari Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10, para pembicara, peserta, panitia dan segenap pendukung acara Simposium Internasional Budaya Jawa tahun 2025. Terima kasih pula untuk semua Abdi Dalem yang telah mengabdikan dan mewujudkan sebagai citra nilai luhur, dedikasi dan pengabdian tulus.

Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 April 2025

Ketua Panitia

Gusti Kanjeng Ratu Hayu



Sambutan Pembukaan Simposium Internasional Budaya Jawa Aparatur di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10, Prameswari Dalem Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan Keluarga besar Keraton Yogyakarta,

Yang terhormat Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X beserta Gusti Putri,

Yang terhormat para Anggota Keluarga Kerajaan Sahabat, Duta Besar, Konsul, Diplomat, Rektor, Profesor, dan Cendekiawan sekalian,

Bapak dan Ibu tamu undangan, pembicara, moderator, serta para peserta simposium semuanya.

Tanggal 13 Maret 1755 menjadi titik awal kronik berdirinya Nagari Yogyakarta di bawah yurisdiksi Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengku Buwono I. Sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono I segera menyusun hierarki atau jaringan kerja terdiri atas sejumlah jabatan, dalam hal ini hadirnya aparatur yang berasal dari golongan sipil maupun militer.

Golongan sipil didominasi oleh *Abdi Dalem* dengan beragam kedudukan. Sementara, aparatur militer diduduki oleh angkatan bersenjata atau kesatuan militer. Dalam pelaksanaannya, sistem aparatur di Keraton Yogyakarta memuat berbagai macam tugas dan kewajiban, pangkat dan jabatan, termasuk sanksi-sanksi.

Dalam birokrasi Jawa, khususnya Mataram, raja atau sultan menjadi poros utama sebuah relasi pemerintah yang meliputi *jagad ageng* (makrokosmos) maupun *jagad alit* (mikrokosmos). Di bawah sultan didukung oleh bangsawan utama, seperti *patih*, *bupati*, dan *nayaka* untuk menata wilayah di bawah kekuasaan Nagari Yogyakarta. Di bawahnya lagi ada *kawula* (rakyat) yang diwujudkan dalam bentuk bakti sebagai *Abdi Dalem* kerajaan, bahkan menjadi kunci sukses penyelenggaraan upacara nan sakral atau profan, hingga terlaksananya segala tata rumah tangga istana.

Relevan dengan kondisi saat ini, komponen aparatur menjadi salah satu syarat berdirinya negara berdaulat, ini sesuai dalam Konvensi Montevideo di Uruguay tahun 1933. Dalam traktat disebutkan bahwa dari kedaulatan suatu negara apabila dapat memenuhi 4 kualifikasi, di antaranya wilayah yang jelas, masyarakat yang menetap, pemerintahan yang mapan, dan diakui oleh negara lain.

Ihwal komponen wilayah, eksistensi Kabupaten/Kota dan Kalurahan di DIY tidak lepas dari eksistensi pemerintahan nagari Kasultanan Yogyakarta. Nomenklatur wilayah di DIY mengalami perubahan menyesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya: perubahan nomenklatur di pemerintah daerah seperti kemantren, kapanewon, kalurahan, yang merujuk pada kedudukan pengemban tanggung jawab pengelola tanah-tanah keraton.

Linimasa sejarah mencatat bahwa pertahanan militer di Kasultanan Yogyakarta mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono II. Tiap prajurit dibekali dengan persenjataan lengkap, seperti senapan, tombak, pedang, panah, dan keris. Sultan juga membentuk sejumlah kesatuan baru. Di antaranya kesatuan *Mantrijeron*, yang bertugas menjaga keselamatan raja, keluarga, serta kompleks keraton. Selain itu ada kesatuan *Ketanggung* yang bersenjata senapan dan senjata tajam, termasuk *Wirubrojo*, *Nyutro*, *Jogokaryo*, *Daeng*, *Jogokaryo*, *Namengyudo*, *Potroyudo*, *Yudomenggolo*, *Bugisan*, *Tanahastro*, *Jogokotho*, *Mandung*, *Patangpuluh*, *Suronoto*, *Blambangan Sepuh*, *Seselo*, *Suryotomo*, dan *Upit*. Kendati demikian, beberapa kesatuan tersebut mengalami reduksi akibat campur tangan Daendels saat bertugas di Pulau Jawa.

Pasca-Perang Jawa juga menjadi catatan merah terkait kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mendemiliterisasi kekuatan angkatan bersenjata Kasultanan Yogyakarta sehingga jumlahnya tidak boleh lebih dari 500 orang prajurit. Hingga

akhirnya semua kesatuan militer milik keraton dibubarkan pada masa kependudukan Jepang.

Tak bisa dipungkiri, pasang surut keberadaan aparatur Nagari Yogyakarta menjadi bagian penerimaan dinamika sosial. Pada tahun 1970, kesatuan prajurit keraton dihidupkan kembali. Keberadaannya direkonstruksi atas prakarsa BRM Herjuna Darpita (kelak bergelar Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10) saat ada karnaval kebudayaan. Berawal dari revitalisasi tersebut, satu per satu kesatuan prajurit atau *bregada* mulai dihidupkan kembali guna melengkapi acara-acara budaya di keraton. Ada kesatuan-kesatuan yang dihidupkan kembali namun ada juga yang dilebur menjadi kesatuan baru. Jumlah keseluruhan terdapat 10 kesatuan (*bregada*) yang dipertahankan hingga hari ini. Pada Garebeg Besar Tahun Jawa 1957/2024 M, keraton merevitalisasi keberadaan Abdi Dalem Citralata dan Pralata yang menari di depan arak-arakan gunung sebagai simbol tolak bala. Sementara pada Garebeg Mulud 2024, prajurit Nyutra hadir dengan langkah tegap tayungan seiring tabuhan Gangsa Kiai Guntur Sari.

Perihal pengaturan pangkat dan kedudukan, secara umum terdapat 11 jenjang kepangkatan bagi Abdi Dalem Punakawan dan Kaprajan. Mulai dari jajar, bekel anom, bekel sepuh, lurah, penewu, wedono, riyo bupati, bupati anom, bupati sepuh, bupati kliwon, dan bupati nayoko. Dalam kurun waktu tertentu, kedudukan Abdi Dalem dapat naik ke jenjang selanjutnya menyesuaikan lamanya mengabdikan dan dedikasi. Pangkat dan kedudukan tersebut juga dilakukan penyesuaian sebagaimana sistem tata kelola pemerintahan modern. Misalnya, Abdi Dalem berpangkat bekel sepuh setara dengan ASN golongan III/a, Abdi Dalem berpangkat kliwon sejajar dengan kapten dalam lingkungan TNI, sedangkan bupati nayaka itu sama dengan komisariss jenderal dalam lingkungan Polri. Detailnya diatur dalam Pranata Kalenggahan Pratelan Urutane Pangkat yang dikeluarkan oleh Kawedanan Hageng Panitra Pura pada 27 Januari 2006.

Perihal ini semua masih menjadi kerja pelestarian bagi keraton, yang bersumber dari dokumen tertulis maupun litografi keraton. Tidak hanya mengungkapkannya melalui nilai historis keberadaan atau nilai filosofis atribut dan busana, keraton sebagai museum hidup bersama-sama dengan semua lapisan aparatur, baik *Abdi Dalem Punakawan*, *Keprajan*, kesatuan prajurit melangkah bersama zaman yang terus berkembang. Keraton hadir menjadi bukti kontinuitas kerja kebudayaan yang tak

berhenti, sebagaimana falsafah, *Manunggaling Kawula Gusti*, untuk mewujudkan Yogyakarta Istimewa yang selaras dan bersatu padu, antara rakyat dan pemimpin.

Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, mewakili Keraton Yogyakarta saya menyampaikan rasa terima kasih yang dalam atas partisipasi bapak dan ibu sekalian dalam Simposium Internasional Budaya Jawa yang ke-7. Semoga gelaran ini terbuka ruang seluas-luasnya bagi studi keilmuan Aparatur di Kesultanan Yogyakarta, baik antropologi, filologi, sejarah, sains, politik, psikologi, pendidikan, gender, filsafat dan lain sebagainya yang terkait dengan Budaya Jawa. Tak lupa, kami juga menyampaikan terima kasih mendalam untuk seluruh *Abdi Dalem* yang telah mendedikasikan hidupnya di Keraton Yogyakarta hingga kini dan nanti. Terima kasih atas tanda bakti dan cinta kasih selama kebersamaan Keraton Yogyakarta. Sekian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi

Schedule

Day 1: Saturday, 12 April 2025

Time	Activity
08:00 – 09:00	Registration
09:00 – 09:30	Opening Performance
09:30 – 09:45	Remarks HRH Princess Hayu
	Opening HRH Princess Mangkubumi
09:45-09:50	Prayers by Kanca Kaji
09:50 – 10:45	Coffee Break
	Press Conference with Tingalan Jumenengan Dalem Chairperson
10:45 13:00	Session I: History
	Introduction of speakers by moderator Prof. Nur Hidayanto P.S.P., S.Pd., M.Pd., Ph.D. Dean of Faculty of Language, Art, and Culture, Universitas Negeri Yogyakarta
	Keynote by reviewer 1 Prof. Dr. Ardent Graf Professor of Southeast Asian Studies at Goethe-University Frankfurt, Germany
	Presenter 1.1 Peran dan Fungsi Prajurit Estri Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta Masa Hamengku Buwana II Dr. Hayu Adi Darmarastri, S.S., M.Hum.
	Presenter 1.2 Dari Reorganissi Agraria Sampai Reformasi: Lembaga Pertanahan Kesultanan Yogyakarta Tiwuk Kusuma Hastuti, S.S., M.Hum.

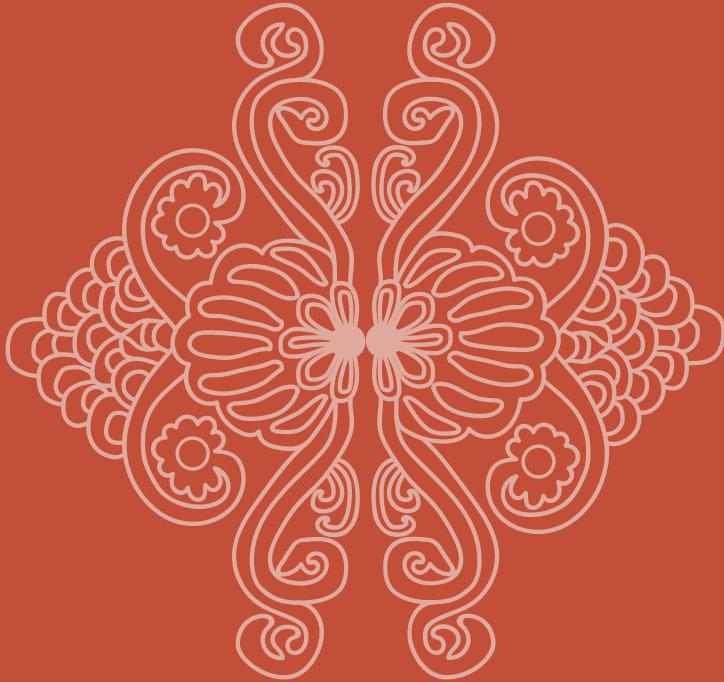
Time	Activity
	<p>Presenter 1.3 Sejarah Penegakan Hukum pada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat: Studi Historical Law Pengadilan Darah Dalem dan Pengadilan Surambi Mastri Imammusadin, S.H.</p> <p>Q & A between moderator & speakers</p> <p>Q & A with audience</p>
13:00 – 14:00	Lunch Break
	<p>Session II: Politic, Law, and Governance</p> <p>Introduction of speakers by moderator Wawan Mas’udi, S.IP., M.P.A., Ph.D. Dean of Faculty of Social and Politics, Universitas Gadjah Mada</p> <p>Keynote by reviewer 2 Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.A. Professor of Anthropology of Law at Universitas Indonesia</p> <p>Presenter 2.1 Dari Pengadilan Pradata Menuju Perdata: Perkembangan Sistem Hukum Kasultanan Yogyakarta di era Hindia Belanda Dr. Waskito Widi Wardoyo, S.S., M.A.</p> <p>Presenter 2.2 Cultural Diplomacy and Governance; The Papatih Ndalem’s Role in Promoting Welda Sana Vero, S.Hum., M.A.</p> <p>Presenter 2.3 Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI</p> <p>Q & A between moderator & speakers</p> <p>Q & A with audience</p>
16:15 – 17:00	Closing and continued by afternoon tea

Day 2: Sunday, 13 April 2025

Time	Activity
07:30 – 08:30	Registration
08:30 - 11:00	Session III: Socio Culture
	Introduction of speakers by moderator Retno Kusumawiranti, S.Sos, M.P.A. Vice Rector II Universitas Widya Mataram
	Keynote by reviewer 3 Prof. Em. Andre Avellino Hardjana, Ph.D. Emiritus Professor at Universitas Atma Jaya Yogyakarta
	Presenter 3.1 Aparatur Penerjemah di Kraton Yogyakarta Bambang Muhamad Fasya Azhara, S.Hum.
	Presenter 3.2 The Evolving Role of Abdi Dalem Kraton Yogyakarta: Navigating Modernity, Sustainability, and Digitalization Nina Megawati, S.S., CSRS.
	Presenter 3.3 Pengejawantahan Panjantra dan Panjangka dalam Tata Paprentahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Antonius Maria Indrianto, S.IP, MA. Kanca Renstra Keraton Yogyakarta
	Q & A between moderator & speakers
	Q & A with audience
10:45 – 11:15	Coffee break
11:15 – 12:30	Talk Show Keraton Updates Moderator Prof. Dr. Drs. R.M. Pramutomo, M.Hum. Nara Sumber: Prof. Dr. Y. Sumandiyo Hadi, SST., SU. Prof. Dr. Sukadari, S.E., S.H., M.M. Letda Dr. Misran Wahyudi, S.H., M.H.,
12:30 – 13:30	Lunch Break

Time	Activity
13:30 – 15:45	Sesi IV: Art & Literature
	Introduction of speakers by moderator Dr. G.R. Lono Lastoro Simatupang, M.A. Academic at Anthropology Department & Performing Arts and Visual Arts Studies Universitas Gadjah Mada
	Keynote from reviewer 4 Dr. Helene Njoto Feillard Art and Architecture Historian, Research Associate, Ecole Française d'Extrême-Orient (EFEO)
	Presenter 4.1 Adapting Tradition: Abdi Dalem Contribution to Dance Education at Kridhamardawa Amidst Pedagogical Shifts Associate Professor Dr. Muhammad Fazli Taib bin Saearani
	Presenter 4.2 Peran dan Fungsi <i>Abdi Dalem Musik</i> dalam <i>Kraton Orcest Djogja</i> Dr. Sn. R.M. Surtihadi, S.Sn., M.Sn.
	Presenter 4.3 Kiprah Abdi Dalem Keparak Kraton Yogyakarta Dalam Naskah Kraton Huishouding KBG 950 Erma Purwati, S.S.
	Q & A between moderator & speakers
	Q & A with audience
15:45 – 16:00	Closing HRH Princess Bendara
16:00 – 16:30	Afternoon Tea

Yogyakarta Royal Orchestra





Peragaan Busana Prajurit Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Penampilan Spesial: Orkestrasi Gendhing Prajurit oleh Yogyakarta Royal Orchestra



Berbeda dari pembukaan International Symposium on Javanese Culture tahun-tahun sebelumnya yang menghadirkan penampilan *beksan* (tarian), pada tahun 2025 ini Kawedanan Kridhamardawa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat akan bekerja sama dengan Kawedanan Kaprajuritan menghadirkan Peragaan Busana Prajurit Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan diiringi orkestrasi *gendhing prajurit* oleh Yogyakarta Royal Orchestra. Hal ini sejalan dengan tema Simposium dan Pameran Temporer awal tahun ini yang bertajuk 'Hamong Nagari: Aparatur Nagari Yogyakarta'.

Busana prajurit Keraton Yogyakarta yang ditampilkan merupakan hasil rekonstruksi dari naskah-naskah lama. Para peraga busana yang kesehariannya memang bertugas sebagai prajurit keraton ini akan menampilkan busana masing-masing satuannya dalam sebuah defile. Dalam defile prajurit, umumnya menggunakan iringan gendhing prajurit. Namun pada kesempatan ini, iringan defile akan menggunakan gendhing prajurit yang telah digubah dalam format orkestra dan akan dibawakan oleh Yogyakarta Royal Orchestra. Proses orkestrasi gendhing prajurit yang telah berlangsung sejak Januari 2025 ini merupakan hasil kerja kolaboratif korps musik (korsik) prajurit keraton dengan beberapa penggubah dari Yogyakarta Royal Orchestra dan Yogyakarta Royal Choir yang tergabung dalam Abdi Dalem Musik.



The Fashion Show of The Yogyakarta Royal Soldiers Special Performance: Military Orchestration by Yogyakarta Royal Orchestra

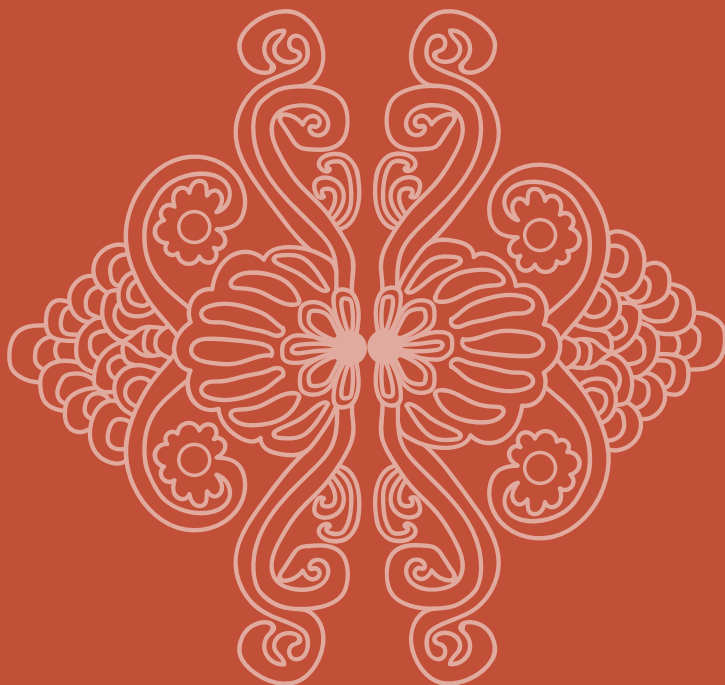


Different from the opening of the International Symposium on Javanese Culture in previous years which presented *beksan* (dance) performances, in 2025 Kawedanan Kridhamardawa will collaborate with Kawedanan Kaprajuritan to present a Fashion Show of the Yogyakarta Royal Soldiers with the special performance of Yogyakarta Royal Orchestra playing the orchestration of *gendhing prajurit*. This performance is in line with the theme of the Symposium and Early Year Temporary Exhibition ‘Hamong Nagari: State Apparatus of Yogyakarta’.

The soldier’s uniform displayed are the result of reconstruction from old manuscripts. The fashion models who are active soldiers will display the uniform of their respective units in a parade. In their marches, the royal soldier are always accompanied by several *gendhing prajurit*—special songs played by the music corps—based on their units.

However, on this occasion, the parade will be accompanied by *gendhing prajurit* that has been arranged into orchestra format which will be performed by the Yogyakarta Royal Orchestra. The process of arranging the *gendhing prajurit* orchestration which has been ongoing since January 2025 is the result of collaborative work between the royal soldier’s music corps (*korsik*) with composers from the Yogyakarta Royal Orchestra as well as Yogyakarta Royal Choir who are members of the *Abdi Dalem Musikan*.

Reviewer & Editor





Prof. Emeritus Andre Avellino Hardjana, Ph.D.

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

Prof. Emeritus Andre Avellino Hardjana, Ph.D. is an expert of Communication Science, from the Faculty of Administrative Sciences, Atma Jaya Catholic University, Jakarta and the Postgraduate Program in Communication Sciences, University of Indonesia. He studied Literature and Culture at Gadjah Mada University, Radboud Universiteit Nijmegen (Netherlands), and the State University of New York (SUNY/ Buffalo, New York), and Communication Sciences at the School of Journalism and Mass Communication, University of Wisconsin-Madison, Wisconsin. In addition to teaching Communication Sciences, he is also a literature enthusiast who has been actively involved in literary activities both as Assistant Editor in Urban Culture Magazine “Basis” and as a freelance writer in daily Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaharuan, the weekly Penabur and Gelora, and the magazines Horizon and Persepsi (published by National Security Institute). As well as writing the book *Literary Criticism: An Introduction* (1980), *Ragam dan Faham dalam Sastra dan Kritik Sastra* (Understanding Literature Variety and Criticism). He also translated the classic books *Poetics and Rhetoric* (2021) by the philosopher Aristotle, and the *Tragedy Drama Oedipus Raja* (2022) by Sophocles.



Prof. Dr. Arndt Graf
Goethe-University of Frankfurt

Prof. Dr. Arndt Graf studied Austronesian Languages and Cultures, Political Science, and Economics of Development at the University of Hamburg, Universitas Gadjah Mada, and the School of Oriental and African Studies (SOAS, London), with a main focus on Indonesia and the Malay World. He taught at the University of Hamburg (1992-2005), Cornell University (1998-9), and Universiti Sains Malaysia (2006-2009). He was also a Visiting Professor at Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2004), Université de la Rochelle (France, 2005), Universiti Malaya (2013), and the École Normale Supérieure (ENS) in Lion, France (2014). His current position is as Head and Professor of the Department of Southeast Asian Studies, Goethe-University of Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany, since 2009. From 2017 to 2019 he was the Vice President of the European Association for Southeast Asian Studies (EUROSEAS). He also plays an active role on the editorial board of many academic journals in Indonesia and Malaysia.



Dr. Helene Njoto Feillard

Ecole Française d'Extrême-Orient (EFEO)

Dr. Hélène Njoto Feillard is an art and architecture historian. She is an associate researcher at EFEO (*École Française d'Extrême-Orient* / French School of The Far East), representing the EFEO Jakarta office from 2021 to 2023. She is also an Associate Fellow at the Southeast Asia Center (CASE) in Paris and a member of the French Journal *Archipel* editorial committee and Indonesian journal *Berkala Arkeologi*.

Her Ph.D degree was received from EHESS in 2014 and published in 2024 by EFEO title: “*Sultan-Builders and Architectural Innovations in Java in the Beginning of the Colonial Period (16th-Early 19th century)*”. She is currently involved in a long research with BRIN about Early Islamic Art from Java and Madura from the 16th to the 18th century. Her center of interest includes cultural history, heritage studies, history of art and architecture, and Asian studies (Indonesia and Southeast Asia).



Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.A.
University of Indonesia

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.A. is a Professor of Legal Anthropology at the Faculty of Law, University of Indonesia (since 2008). She completed her bachelor's degree in public policy at Universitas Gadjah Mada (1985), master's degree in legal anthropology at Leiden University and Universitas Indonesia (1990), doctoral degree in anthropology at Universitas Indonesia (2000), and post-doctoral at Leiden Law School (2010-2013).

She actively develops the study of “Anthropology of Law” (since 1991), “Gender and Law” (since 1991), and “Socio-Legal Studies” (2006), and networks with the national and international activism related to those fields of studies.

She has been a visiting professor at Kyoto University (2007-2009), and Institute of Social Science, the Hague (2012). She is now the chief editor of the Indonesian Journal of Socio-Legal Studies (since 2020). She has written many books, journal articles, and articles in Kompas newspaper about law and society, women's justice, and university issues.

Some of the awards she has received include: Dedicated Scholar Award from KOMPAS (2014), Soetandyo Wignjosoebroto Award from Universitas Airlangga (2015), Award from Newton Fund Researcher Links (School of Oriental and African Studies, University of London and Universitas Indonesia) (2016), Bosscha Medal from LDE (Leiden, Delft & Erasmus Universities (2024).

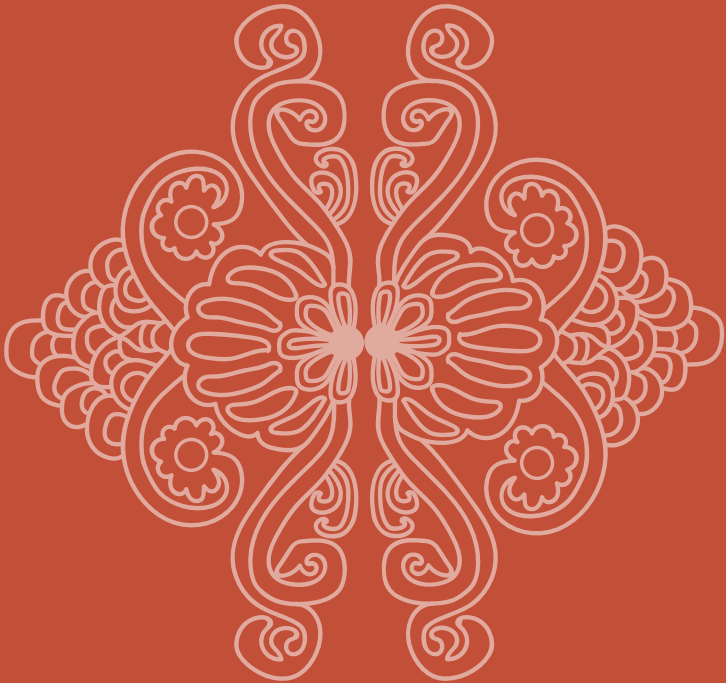


Prof. Dr. Drs. R.M. Pramutomo, M.Hum.
ISI Surakarta

Prof. Dr. Drs. R.M. Pramutomo, M. Hum., is a Professor in Ethnochoreology, he earned a Bachelor of Dance from ISI Yogyakarta (1992), a Master of Humanities Study from UGM Graduate School (2001). In 2001-2002 he attended a Culture and Performance Studies Program, University of California, Los Angeles (UCLA), USA. He earned a Doctorate degree in Performing Arts Studies from UGM (2008). The following year he attended the Senior Lecturer Fellowship Program of Academic Recharge (PAR) at Leiden Universiteit, the Netherlands. He is also active in organizations as Chair of the Expert Council for The Archives and Art Document Studies Center at K.R.T. Wiroguno Center, and Chairperson of the Siswa Among Beksa Dance Institute (2023-2028). He is an Editorial Board in International Journal of Culture and History, Canada since 2021 to presently. He is also an Editorial Board of SPAFA Journal of SEAMEO, Thailand since 2024 to presently. His deep interest in Dance and Performing Arts led him to experience many national and international workshops and dance festivals, in Asia, America, Europe, and Australia.

He is also a writer and has produced many scientific works published in various national and international journals. As a structural official of ISI Surakarta, he was once the Chair of the Research Institute (2013-2017). Vice Rector III for Student Affairs and Cooperation (2017-2021). Chair of Quality Quaranty and Learning Development at Indonesia Institute of the Arts Surakarta (2024 to presently). Currently active as a permanent lecturer at the Faculty of Performing Arts and Postgraduate Program, ISI Surakarta.

Abstract





APARATUR PENERJEMAH DI KERATON YOGYAKARTA HADININGRAT (1908-1940)

Bambang Muhamad Fasya Azhara, S.Hum.
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tugas dan peran aparatur penerjemah di lingkungan Kraton Yogyakarta, serta kehidupan sosial aparatur penerjemah. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji berbagai literatur mengenai aparat tenaga penerjemah di Kraton Yogyakarta, dan penulis juga menggunakan penelitian metode sejarah. Tenaga penerjemah di Kraton Yogyakarta menjadi penghubung interaksi dan komunikasi antara pihak Kraton Yogyakarta dengan pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan surat kabar *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië* yang terbit pada 25/10/1933 menyebutkan bahwa seorang penerjemah merupakan sumber dari segala informasi tentang kehidupan di Kraton. Kedudukan aparat penerjemah berada di bawah Departemen Kehakiman, sehingga turut berperan dalam pengadilan, dan bukan hanya bertugas sebagai penerjemah bahasa, namun juga mengatur agenda kunjungan resmi ataupun tidak resmi di Kraton Yogyakarta. Seorang aparatur penerjemah secara sosial berasal dari kalangan elite pribumi, sehingga memiliki kedekatan sosial dengan kalangan Eropa yang kemudian mempengaruhi gaya hidup aparatur penerjemah yang bergaya Eropa, ditinjau dari gaya pakaian saat melakukan dinas kerja, dan jamuan makan yang diikuti oleh aparatur penerjemah ketika sedang bertugas sebagai aparatur penerjemah.

Kata Kunci: *Aparatur, Penerjemah, Kraton Yogyakarta*



TRANSLATOR APPARATUS AT THE KRATON YOGYAKARTA HADININGRAT (1908-1940)

Bambang Muhamad Fasya Azhara, S.Hum.
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

This research aims to describe the duties and roles of the translator apparatus in the Yogyakarta Palace, as well as the social life of the translator apparatus. In this research, the author reviews various literatures about the translator apparatus in the Yogyakarta Palace, and the author also uses historical method research. The translator apparatus at the Yogyakarta Palace became the link of interaction and communication between the Yogyakarta Palace and the Dutch colonial government. Even the newspaper *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië* published on 25/10/1933 mentioned that a translator was the source of all information about life in the Palace. The position of the interpreter is under the Ministry of Justice, so he plays a role in the court, and not only serves as a language interpreter, but also organises the agenda of official or unofficial visits in the Yogyakarta Palace. A translator apparatus socially comes from the indigenous elite, so it has social closeness with Europeans, which then affects the lifestyle of the translator apparatus which is European-style, judging from the style of clothing when conducting work services, and banquets attended by the translator apparatus while on duty as a translator apparatus.

Keywords: Apparatus, Translator, Yogyakarta Palace



Kiprah Abdi Dalem Perempuan Keraton Yogyakarta Dalam Naskah *Kraton Huishouding* KBG 950

Erma Purwati, S.S.
Perpustakaan Nasional

Penelitian ini membahas mengenai abdi dalem perempuan atau sering disebut abdi dalem *keparak* yang bertugas di Keraton Yogyakarta. Hal unik yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya karena abdi dalem *keparak* dalam penelitian ini berdasarkan keterangan yang ada dalam naskah *Kraton Houishoding* KBG 950 koleksi Perpustakaan Nasional. Tahapan penelitian dimulai dengan membaca naskah, menelaah isi yang terkandung di dalamnya didukung beberapa literatur yang berkaitan dengan judul penelitian serta wawancara dengan beberapa abdi dalem. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abdi dalem *keparak* dibagi menjadi dua yaitu *keparak kilenan* dan *keparak wetanan*. Jenjang kepangkatan abdi dalem *keparak* dimulai dari *jajar*, *bekel*, *lurah*, *kliwon* hingga *riya*. Selama masih terus mengabdikan dan belum memiliki jenjang kepangkatan, abdi dalem *keparak* disebut dengan *kanca keparak*. *Kanca keparak* dibagi menjadi beberapa golongan di antaranya; *sedhahan*, *dhak lebet*, *pasareyan*, *kepilih*, *dhak Jawi*, *gandhek*, *sumbaga*, *pasindhen*, *madharan*, dan *bok regol*. Contoh abdi dalem *keparak* yang ada dalam naskah *Kraton Houishoding* adalah *nyai*, *amping*, *inya*, dan *emban*. Untuk menjadi abdi dalem *keparak* ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi seperti latar belakang sosial dan kecocokan dengan bendara yang akan diasuh. Setelah diangkat, seorang abdi dalem berhak mendapatkan upah/gaji, makanan dan beberapa lembar pakaian. Masa pengabdian antara satu dengan yang lainnya berbeda tergantung tanggung jawab yang diemban.

Kata Kunci: abdi dalem perempuan, keparak; keraton Yogyakarta; *Kraton Huishoding*



The Role of Female *Abdi Dalem* (Courtiers) of the Yogyakarta Palace in the *Kraton Huishouding* Manuscript KBG 950

Erma Purwati, S.S.
Perpustakaan Nasional

This research discusses the royal servant lady or often called *abdi dalem keparak*, who served in the Yogyakarta Palace. The unique thing that distinguishes this research from other research because is *abdi dalem keparak* in this research is based on the information in the manuscript of *Kraton Houishoding KBG 950* collection of the National Library. The research stage begins with reading the manuscript, analyzing its contents contained therein supported several literature relating to the title and interviews with several servants. The method used is descriptive qualitative. The results showed that the royal servant was divided into two namely *keparak kilenan* and *keparak wetanan*. Their ranking system starts from *jajar*, *bekel*, *lurah*, *kliwon*, and finally *riya*. As long as they continue to serve and do not have a level, they are called *kanca keparak*. *Kanca keparak* is divided into several groups, including; *sedhahan*, *dhak lebet*, *pasareyan*, *kepilih*, *dhak Jawi*, *gandhek*, *sumbaga*, *pasindhen*, *madharan*, and *bok regol*. The examples of *abdi dalem keparak* mentioned in the *Kraton Houishoding* manuscript include *nyai*, *amping*, *inya*, and *emban*. To become an *abdi dalem keparak*, certain criteria must be met, such as social background and compatibility with the *bendara* (noble or royal family member) they will serve. Once appointed, an is entitled to a salary, food, and several sets of clothing. The service period of each servant in the palace is different depending on the responsibilities that are carried out.

Keywords: the royal servant lady, *keparak*; Yogyakarta Palace; *Kraton Huishoding*



MENGADAPTASI TRADISI: KONTRIBUSI ABDI DALEM TERHADAP PENDIDIKAN TARI DI KRIDHAMARDAWA DI TENGAH PERGESERAN PEDAGOGIS

Associate Professor Dr. Muhammad Fazli Taib bin Saarani
Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi *Abdi Dalem* terhadap pendidikan tari di Kridhamardawa, Kraton Yogyakarta, di tengah pergeseran pendekatan pedagogis. Secara tradisional berperan sebagai penjaga budaya, *Abdi Dalem* juga berfungsi sebagai pendidik tari dengan mengintegrasikan latar belakang akademik dan metodologi pengajaran yang beragam. Keterlibatan mereka telah memperkenalkan perubahan dalam pengajaran tari tradisional yang dipengaruhi oleh institusi formal seperti Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Penelitian ini menelaah bagaimana *Abdi Dalem* mengadaptasi pendekatan pendidikan eksternal sambil tetap menjaga identitas dan nilai-nilai inti Kraton. Dengan pendekatan fenomenologi kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap praktik pengajaran di Kridhamardawa. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya interaksi antara pedagogi tradisional Kraton dan pengaruh pendidikan eksternal, menggambarkan bagaimana *Abdi Dalem* menavigasi perubahan ini untuk menjaga warisan budaya sambil berkontribusi pada perkembangan pendidikan tari. Studi ini menyoroti peran ganda mereka sebagai pelestari tradisi dan pendidik yang adaptif, menunjukkan bagaimana Kraton merespons perubahan pedagogis kontemporer tanpa mengorbankan warisan budayanya yang khas.

Kata Kunci: Kraton Yogyakarta, Kridhamardawa, Abdi Dalem, Aparatus, Pendidikan Tari



ADAPTING TRADITION: *ABDI DALEM* CONTRIBUTION TO DANCE EDUCATION AT KRIDHAMARDAWA AMIDST PEDAGOGICAL SHIFTS

Associate Professor Dr. Muhammad Fazli Taib bin Saearani
Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

This study explores the contribution of *Abdi Dalem* to dance education at Kridhamardawa, Kraton Yogyakarta, amidst shifts in pedagogical approaches. Traditionally serving as cultural custodians, the *Abdi Dalem* also function as dance educators, integrating diverse academic backgrounds and teaching methodologies. Their involvement has introduced changes to traditional dance instruction, influenced by formal institutions such as Institute of the Arts (ISI) Yogyakarta and Yogyakarta State University. This research examines how *Abdi Dalem* adapt external educational approaches while maintaining the Kraton's identity and core values. Employing a qualitative phenomenological approach, data was collected through in-depth interviews and participatory observations of teaching practices at Kridhamardawa. The findings reveal an interaction between traditional Kraton pedagogy and external educational influences, illustrating how *Abdi Dalem* navigate these shifts to sustain cultural heritage while contributing to evolving dance education. The study highlights their dual role as tradition-bearers and adaptive educators, demonstrating how the Kraton responds to contemporary pedagogical changes without compromising its distinctive legacy.

Keywords: Kraton Yogyakarta, Kridhamardawa, *Abdi Dalem*, Apparatus, Dance Education



PERAN DAN FUNGSI PRAJURIT ESTRI LANGEN KUSUMA DI KASULTANAN YOGYAKARTA MASA HAMENGGU BUWANA II

Dr. Hayu Adi Darmarastri, S.S., M.Hum.
Universitas Sebelas Maret

Selama ini masyarakat Jawa dikenal sebagai pelaku budaya patriarkhi yang berakibat memosisikan kaum perempuan di bawah kaum pria. Namun ternyata terdapat periode dimana kaum perempuan berada dalam keadaan yang berbeda. Kaum perempuan tidak hanya melakukan kegiatan domestik namun juga aktif dalam kegiatan militer serta mendukung kebijakan politik kerajaan. Hal ini terwujud dalam peran dan fungsi yang dimiliki Prajurit *estri* Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam tentang pembentukan serta fungsi Prajurit *estri* Langen Kusuma di Kasultanan Yogyakarta masa Sultan Hamengku Buwana II. Dalam upaya untuk menemukan realitas berkaitan dengan peran dan fungsi Prajurit Langen Kusuma maka tulisan ini menggunakan Metode Sejarah.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Prajurit *estri* Langen Kusuma berawal dari prajurit pengawal pribadi Raden Mas Sundara ketika masih menjadi putra mahkota yang kemudian tetap dipertahankan ketika beliau naik tahta menjadi Sultan Hamengku Buwana II. Prajurit Langen Kusuma tidak hanya sekedar bertugas menjaga keamanan raja namun juga dibekali keahlian seni yang dimanfaatkan untuk kepentingan kerajaan. Beberapa dari prajurit *estri* tersebut juga dijadikan sebagai *triman* sebagai sarana penjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa lokal yang diragukan loyalitasnya kepada raja.

Kata Kunci: Peran dan Fungsi, Prajurit *estri* Langen Kusuma, Kasultanan Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwana II



THE ROLE AND FUNCTION OF THE FEMALE SOLDIERS (*PRAJURIT ESTRI*) OF LANGEN KUSUMA IN KASULTANAN YOGYAKARTA DURING HAMENGGU BUWANA II

Dr. Hayu Adi Darmarastri, S.S., M.Hum.
Universitas Sebelas Maret

Javanese society was well known to be the enabler of patriarchal belief, which resulted in the positioning of women's social status beneath men. There was a time when women's societal values differed in Keraton Kasultanan Yogyakarta. The women were not only doing domestic works, but allowed to actively take part in military activities and support Keraton's political activity. These were accomplished by the role and function of female troops or *prajurit estri* Langen Kusuma Kasultanan Yogyakarta. This study aims to analyze the formation and the function of Prajurit Langen Kusuma Kasultanan Yogyakarta during the reign of Sultan Hamengku Buwana II. Through the effort to find clarity on the role and function of Prajurit Langen Kusuma, this research used historical method. The conclusion of this study is that the Prajurit Langen Kusuma was originated from the personal guards of Raden Mas Sundara when he was still a Crown Prince and remained when he was coronated as Sultan Hamengku Buwana II. The Prajurit Langen Kusuma was not only tasked with guarding the king but also came with artistic performance abilities for Keraton's purposes. Some of the *prajurit estri* were appointed as *triman* or the ones in charge of maintaining diplomatic relations with the royalties whose loyalty to the king was questioned.

Keywords: Role and function, *Prajurit estri* Langen Kusuma, Kasultanan Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwana II



SEJARAH PENEGAKAN HUKUM PADA KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT: STUDI HISTORICAL LAW PENGADILAN DARAH DALEM DAN PENGADILAN SURAMBI

Mastri Imammusadin, S.H.
Universitas Gadjah Mada

Sebelum menjadi bagian dari Republik Indonesia, Kasultanan Ngayogyakarta merupakan institusi negara berdaulat dengan sistem penegakan hukum di dalamnya. Penelitian ini menelusuri arsip pada Kapustakan Widya Budaya dan literatur terkait untuk menelisik dinamika penegakan hukum di Kasultanan Ngayogyakarta dalam perspektif *historical law study*. Penelitian ini merupakan studi normatif melalui pendekatan *cultural law* dengan *research library* dan wawancara pihak terkait untuk menemukan konteks yang sesuai dengan cerita turun-temurun yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan Kasultanan Ngayogyakarta adalah negara demokratis dengan jaminan kebebasan berekspresi, memiliki sistem peradilan dengan aparaturnya lengkap, serta menerapkan prinsip kepastian hukum. Meskipun dipengaruhi hukum kolonial, namun kearifan hukum Jawa tetap melekat. Terungkap pula bahwa Pengadilan Surambi yang merupakan salah satu lembaga peradilan di karaton, berkontribusi besar dalam terbentuknya Peradilan Agama pada sistem hukum Indonesia modern saat ini. Sedangkan Pengadilan Darah Dalem merupakan pengadilan khusus keluarga internal karaton. Selain itu, terungkap bahwa sistem peradilan di dalam karaton berjalan dengan menerapkan sistem peradilan yang modern, juga tampak ada upaya dari internal karaton untuk melepaskan diri dari intervensi pemerintah kolonial. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa peradilan lokal menjadi aspek penting dalam sejarah pembentukan hukum Indonesia.

Kata Kunci: Kasultanan Ngayogyakarta, Pengadilan Darah Dalem, Pengadilan Surambi, *Cultural Law*, *Studi Historical-Law*.



THE HISTORY OF LAW ENFORCEMENT IN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT SULTANATE: HISTORICAL LAW STUDY OF *PENGADILAN DARAH DALEM AND PENGADILAN SURAMBI*

Mastri Imammusadin, S.H.
Universitas Gadjah Mada

Before becoming part of the Republic of Indonesia, Ngayogyakarta Sultanate was a sovereign state institution with its own law enforcement system. This research explores the archives at Widya Budaya Library and related literature to examine the dynamics of law enforcement in the Ngayogyakarta Sultanate in the perspective of historical law study. This research is a normative study through cultural law approach with library research and interviews with related parties to find the appropriate context with hereditary stories related to law enforcement.

The result of this study shows that Ngayogyakarta Sultanate is a democratic state with guaranteed freedom of expression, has a judicial system with complete apparatus, and applies the principle of legal certainty. Although influenced by colonial law, Javanese legal wisdom remains. It was also revealed that the Surambi Court, which is one of the judicial institutions in the palace, contributed greatly to the formation of the Religious Courts in the modern Indonesian legal system today. Meanwhile, the Dalem Blood Court is a special court for the internal family of the palace. In addition, it was revealed that the court system in the palace was running by applying a modern judicial system, and there was also an effort from within the palace to break away from the intervention of the colonial government. This research underlines that local courts are an important aspect in the history of Indonesian legal formation.

Keywords: Ngayogyakarta Sultanate, Dalem Blood Court, Surambi Court, Cultural Law, Historical-Law Study.



DINAMIKA PERAN ABDI DALEM KRATON YOGYAKARTA: DALAM MENAVIGASI MODERNITAS, KEBERLANJUTAN, DAN DIGITALISASI

Nina Megawati, S.S., CSRS.
Kober Institute

Penelitian ini memaparkan peran yang terus berkembang dari *Abdi Dalem*, penjaga tradisional *Kraton* Yogyakarta, dalam melestarikan warisan budaya di tengah modernitas dan globalisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif, analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik berdasarkan kerangka kerja enam tahap oleh Braun dan Clarke (Byrne, 2021; Braun & Clarke, 2019). Melalui wawancara mendalam dengan *Abdi Dalem* dan penelitian arsip, penelitian ini mengidentifikasi pola adaptasi mereka terhadap kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Penelitian ini menyoroti komitmen mereka dalam mengintegrasikan alat dan platform digital untuk terhubung dengan generasi muda, bersama dengan inisiatif *Kraton* seperti pameran dan kegiatan budaya, yang menjadi contoh nyata pertemuan tradisi dan inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Abdi Dalem* telah beralih dari sekadar melestarikan artefak budaya menjadi merekontekstualisasi artefak tersebut agar relevan dengan zaman. Perubahan ini dilakukan melalui penekanan pada globalisasi institusi budaya dan keterlibatan yang berkelanjutan dengan audiens modern. Penggunaan platform digital dan pemberdayaan komunitas secara proaktif oleh *Abdi Dalem* memastikan warisan budaya Jawa tetap hidup dan mudah diakses di era digital. Selain itu, penelitian ini menjembatani kesenjangan antara diskursus akademik dan pemahaman publik tentang kontribusi *Abdi Dalem*, mendorong apresiasi yang lebih besar terhadap peran penting mereka dalam keberlanjutan budaya. Dengan memadukan tradisi dan modernitas, *Abdi Dalem* menunjukkan model yang menarik untuk pelestarian budaya, memastikan penyampaian pengetahuan dan warisan budaya yang dinamis di abad ke-21. Upaya mereka menegaskan interaksi dinamis antara warisan budaya dan inovasi kontemporer.

Kata Kunci: Abdi Dalem, Kraton Yogyakarta, *Cultural Sustainability*, Modernitas, *Cultural heritage*, Digitalisasi



THE EVOLVING ROLE OF *ABDI DALEM* KRATON YOGYAKARTA: NAVIGATING MODERNITY, SUSTAINABILITY AND DIGITALIZATION

Nina Megawati, S.S., CSRS.
Kober Institute

This study describes the evolving role of the *Abdi Dalem*, the traditional custodians of the *Kraton* Yogyakarta, in preserving cultural heritage amidst modernity and globalization. Using qualitative methods, data were analyzed with thematic analysis based on the six-phase framework by Braun and Clarke (Byrne, 2021; Braun & Clarke, 2019). Through in-depth interviews with *Abdi Dalem* and archival research, the study identifies patterns in their adaptation to technological advancements and societal shifts. It highlights their commitment to integrating digital tools and platforms to connect with younger generations, alongside *Kraton*-led initiatives like exhibitions and cultural activities, exemplifying the intersection of tradition and innovation. The study reveals that the *Abdi Dalem* have moved from simply preserving cultural artifacts to recontextualizing them for contemporary relevance. This shift is carried out by stressing the globalization of cultural institutions and sustainable engagement with modern audiences. Their proactive use of digital platforms and community outreach ensures that Javanese heritage remains vibrant and accessible in the digital age. Moreover, this research bridges the gap between academic discourse and public understanding of the *Abdi Dalem*'s contributions, fostering greater appreciation for their vital role in cultural sustainability. By blending tradition with modernity, the *Abdi Dalem* demonstrate a compelling model for cultural preservation, ensuring the transmission of knowledge and heritage in the 21st century. Their efforts affirm the dynamic interplay between cultural legacy and contemporary innovation.

Keywords: *Abdi Dalem*, *Kraton* Yogyakarta, Cultural Sustainability, Modernity, Cultural heritage, Digitalization.



PERAN DAN FUNGSI ABDI DALEM MUSIKAN DALAM KRATON ORCEST DJOGJA

Dr. Sn. R.M. Surtihadi, S.Sn., M.Sn.
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Penelitian ini membahas tentang keberadaan Abdi Dalem Musikan dalam korps musik Eropa Keraton Yogyakarta yang tergabung dalam Kraton Orcest Djogja pada periode pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan fungsi mereka dalam upacara-upacara seremonial, maupun pertunjukan yang digelar baik di keraton, maupun di luar keraton dari masa ke masa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939) Kraton Orcest Djogja mencapai puncak kejayaannya. Hal ini juga didukung keberadaan artefak budaya berupa data sejarah yang dibuktikan dengan adanya bangunan tempat beraktivitas Kraton Orcest Djogja di Bangsal Mandalasana, dan Kampung Musikanan sebagai tempat tinggal para musisi keraton yang difasilitasi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Bukti lain dari keberadaan Korps Musik tersebut juga terdapat pada formasi bentuk penyajian pertunjukan kolaborasi antara gamelan Jawa dengan musik Eropa untuk mengiringi tari Klasik Keraton Yogyakarta, seperti iringan kapang-kapang untuk tari Bedhaya, Srimpi, dan Beksan Lawung Ageng yang diiringi percampuran gamelan Jawa dan instrumen musik Eropa.

Kata Kunci: Abdi Dalem Musikan, Kraton Orkestra Djogja, artefak budaya, musik, orkestra.



ROLES AND FUNCTIONS OF *ABDI DALEM MUSIKAN* IN THE KRATON ORCEST DJOGJA

Dr. Sn. R.M. Surtihadi, S.Sn., M.Sn.
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

This study discusses the existence of *Abdi Dalem Musikan* in the European music corps of the Keraton Yogyakarta during the reign of Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939). The court music corps is called *Kraton Orcest Djogja*. This study aims to determine their role and function in ceremonial ceremonies and performances held both in the Keraton Yogyakarta and outside the court from time to time. The research method used is qualitative with a case study approach. The study results show that during the reign of Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939), *Kraton Orcest Djogja* reached the peak of its glory. This is also supported by the existence of cultural artifacts in the form of historical data as evidenced by the existence of buildings where *Kraton Orcest Djogja* carried out activities in *Bangsal Mandalasana*, and *Kampung Musikanan* as a place of residence for court musicians accommodated by Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Other evidence of the existence of the Music Corps is also found in the formation of the presentation of collaborative performances between Javanese gamelan and European music to accompany the Classical dances of the Keraton Yogyakarta, such as the accompaniment of the *kapang-kapang* for the *Bedhaya*, *Srimpi*, and *Beksan Lawung Ageng* dances which are accompanied by a mixture of Javanese gamelan and European musical instruments.

Keywords: *Abdi Dalem Musikan*, *Kraton Orcest Djogja*, cultural artifacts, music, orchestra



DARI REORGANISASI AGRARIA SAMPAI REFORMASI: LEMBAGA PERTANAHAN KESULTANAN YOGYAKARTA

Tiwuk Kusuma Hastuti, S.S., M.Hum.; Prof. Dr. Dra. Yety Rochwulaningsih, M.Si.;
Prof. Dr. Drs. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum.; Dr. Drs. Haryono Rinardi, M.Hum.
Universitas Sebelas Maret, Universitas Diponegoro

Artikel ini membahas lembaga pertanahan di Kesultanan Yogyakarta sebagai dampak dari Reorganisasi Agraria. Reorganisasi agraria menghidupkan kembali lembaga komunal, karena pemerintah memandang lembaga desa merupakan syarat utama bagi kemajuan penduduk petani. Reorganisasi dilakukan karena adanya keinginan dari pemerintah kolonial untuk melakukan standarisasi, sentralisasi, rasionalisasi dan ekspansi ke wilayah yang belum dikuasai secara langsung, yaitu *Vorstenlanden*. Pemerintah kolonial lebih mudah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakannya, apabila ada kesamaan tatanan administrasi pertanahan. Kajian utama dalam penelitian ini adalah melihat perubahan kelembagaan pertanahan di Kesultanan Yogyakarta ditinjau dari dinamika ekonomi dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejarah kelembagaan pertanahan di Kesultanan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian yaitu reorganisasi agraria di wilayah Kesultanan Yogyakarta mengakibatkan otoritas Kesultanan Yogyakarta semakin berkurang. Institusi kolonial justru semakin mendominasi di sektor ekonomi dan politik. Lembaga pertanahan yang muncul setelah reorganisasi agraria yaitu: Direktorat Proyek Kesultanan (*Directuur van Sultanaat Werken*), lembaga pertanahan yang bertugas untuk menerbitkan kekancingan dan kadaster. Lembaga pertanahan muncul setelah reorganisasi agraria berhubungan dengan kepentingan pemerintah kolonial untuk menggunakan tanah Kesultanan Yogyakarta melalui Direktorat Proyek Kesultanan.

Kata Kunci: Reorganisasi Agraria, Kadaster, Lembaga Pertanahan, Kesultanan Yogyakarta



FROM REORGANIZATION TO REFORMATION : A CASE OF AGRARIAN INSTITUTION OF YOGYAKARTA SULTANATE

Tiwuk Kusuma Hastuti, S.S., M.Hum.; Prof. Dr. Dra. Yety Rochwulaningsih, M.Si.;
Prof. Dr. Drs. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum.; Dr. Drs. Haryono Rinardi, M.Hum.
Universitas Sebelas Maret, Universitas Diponegoro

This article discusses agrarian institution in the Sultanate of Yogyakarta as a result of the agrarian reorganisation. The agrarian reorganisation revived communal institution, as the government viewed the institution of village (*desa*) as a crucial requirement for the advancement of the peasant population. The purpose of the reorganisation was the colonial government's desire to perform standardisation, centralisation, rationalisation as well as expansion to the areas that had not been directly controlled, namely the *Vorstenlanden*. In the sense that with a common agrarian administration order, it would be easier for the colonial government to regulate as well as implement its policies. The main study in this research is to examine the changes of agrarian institution in the Sultanate of Yogyakarta in terms of economic and political dynamics. This research aims to trace the history of agrarian institution in the Sultanate of Yogyakarta. This research uses the historical method which consists of four stages: heuristic or source collection, criticism, interpretation and historiography. The result of this research is the agrarian reorganisation in the Sultanate of Yogyakarta area which resulted in the decrease of the Sultanate's authority. Colonial institution became more dominant in the economic and political sectors. The agrarian institution that emerged following the agrarian reorganisation was: the Directorate of Sultanate Projects (*Directuur van Sultanaat Werken*), an agrarian institution which served at issuing *kekancingan* and cadastres. The agrarian institution that emerged after agrarian reorganisation was related to the colonial government's interest in using the Sultanate's land through the Directorate of Sultanate Projects.

Keywords: agrarian reorganisation, cadastres, agrarian institution, Yogyakarta Sultanate



DARI PENGADILAN PRADATA MENUJU PERDATA: PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM KASULTANAN YOGYAKARTA DI ERA HINDIA BELANDA

Dr. Waskito Widi Wardojo, S.S., M.A.
Universitas Sebelas Maret

Penetrasi kolonial terhadap sistem peradilan Kasultanan Yogyakarta semakin intensif pasca Perang Jawa. Sistem hukum dianggap strategis seiring dengan masuknya modal Barat di kawasan Kasultanan, terutama terkait penggunaan lahan perkebunan, transportasi, pertambangan, dan kehutanan. Mengingat tanah menjadi obyek hukum yang bernilai ekonomis, maka diperlukan jaminan legalitasnya. Dari situ pemerintah kolonial berkepentingan untuk menegakkan sistem hukum positif yang dianggap lebih sesuai bagi pengaturan kepemilikan dan menyelesaikan sengketa yang muncul. Langkah ini menjadi titik awal intervensi yang lebih luas dalam sistem hukum dan peradilan lainnya dengan sasaran sistem peradilan Kasultanan. Luasnya lahan menjadi perhatian pemerintah kolonial yang memerlukan jaminan kepastian usaha bagi pemodal Belanda yang berinvestasi di tanah milik Sultan. Maka, intervensi dalam penataan birokrasi hukum dan administrasi Kasultanan merupakan bagian dari strategi kolonial agar ikut mengatur berbagai aset Kasultanan.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mengandalkan empat prinsip, yakni penelusuran sumber-sumber primer, kritik dan validitas sumber, interpretasi sumber, dan penulisan historiografi. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perubahan sistem peradilan dari Pradata menjadi perdata saat itu? Apa saja konsekuensi dengan penerapan bentuk peradilan Perdata Barat, terhadap persoalan agraria yang menyangkut aset Kasultanan?

Hasil riset menunjukkan bahwa walaupun reorganisasi peradilan Barat di Kasultanan diberlakukan, namun peradilan tradisional masih dipertahankan. Seiring munculnya pengadilan negeri Barat atau Landraad, ternyata juga lahir lembaga baru yakni Majelis Agraria (*Agrarische Kamer*) yang berisi pegawai kerajaan yang berkualitas yang membantu penanganan perkara agraria di wilayah Kasultanan.

Kata Kunci: Pradata, Perdata, Intervensi, *Agrarische Kamer*, Aset



FROM PRE-CIVIL TO CIVIL COURTS: THE DEVELOPMENT OF THE LEGAL SYSTEM OF THE YOGYAKARTA SULTANATE IN THE DUTCH EAST INDIES ERA

Dr. Waskito Widi Wardoyo, S.S., M.A.
Universitas Sebelas Maret

Colonial penetration of the Yogyakarta Sultanate's judicial system intensified after the Java War. The legal system is considered strategic in line with the influx of Western capital in the Sultanate area, especially regarding the use of plantation land, transportation, mining and forestry. Considering that land is a legal object with economic value, it requires guarantees of its legality. From there, the colonial government had an interest in enforcing its positive legal system which was considered more suitable for regulating ownership and resolving disputes that arose. This step was the starting point for broader intervention in the legal and other justice systems targeting the Sultanate's justice system. The size of the land became a concern for the colonial government, which required guarantees of business certainty for Dutch investors who invested in land owned by the Sultan. Thus, intervention in structuring the Sultanate's legal and administrative bureaucracy was part of the colonial strategy to participate in managing the Sultanate's various assets.

This research uses a historical method that relies on four principles, namely tracing primary sources, criticizing and validating sources, interpreting sources, and writing historiography. The problem of this research is how did the justice system change from Pradata to civil at that time? What are the consequences of applying the Western form of civil justice to agrarian issues involving the assets of the Sultanate?

The research results show that although the reorganization of Western justice in the Sultanate was implemented, traditional justice was still maintained. Along with the emergence of the Western District Court or Landraad, it turned out that a new institution was also born, namely the Agrarian Council (Agrarische Kamer), which contained qualified royal employees who helped handle agrarian cases in the Sultanate region.

Keywords: pradata, civil, intervention, agrarische kamer, assets



DIPLOMASI BUDAYA DAN PEMERINTAHAN: PERAN PEPATIH DALEM DALAM MEMAJUKAN NILAI- NILAI JAWA DALAM KEBIJAKAN NASIONAL INDONESIA

Welda Sana Vero, S.Hum., M.A.
Langgeng Culture Center

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Pepatih Dalem* dalam mempromosikan nilai-nilai Jawa dalam kebijakan nasional Indonesia, dengan menggunakan kerangka teori kekuasaan simbolik (Bourdieu), diplomasi budaya (Milton Cummings), dan institusionalisme historis. *Pepatih Dalem* berfungsi sebagai agen yang menyampaikan nilai-nilai seperti harmoni (*rukun*), musyawarah, dan kepemimpinan etis dalam struktur pemerintahan Kesultanan Yogyakarta, serta bagaimana nilai-nilai ini diadaptasi dalam kebijakan nasional setelah kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun jabatan *Pepatih Dalem* sudah tidak ada lagi dalam struktur administratif Kesultanan Yogyakarta, warisan budaya dan simbolik yang dibawanya tetap berpengaruh dalam tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini. Dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional ini, Indonesia dapat memperkuat identitas budaya lokal dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya integrasi kearifan lokal dalam kebijakan nasional dapat meningkatkan legitimasi budaya dan politik Indonesia, menjadikan tradisi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan negara.

Kata Kunci: *Pepatih Dalem*, diplomasi budaya, kekuasaan simbolik, institusionalisme historis, nilai-nilai Jawa



CULTURAL DIPLOMACY AND GOVERNANCE: THE PEPATIH DALEM'S ROLE IN PROMOTING JAVANESE VALUES WITHIN INDONESIA'S NATIONAL POLICIES.

Welda Sana Vero, S.Hum., M.A.
Langgeng Culture Center

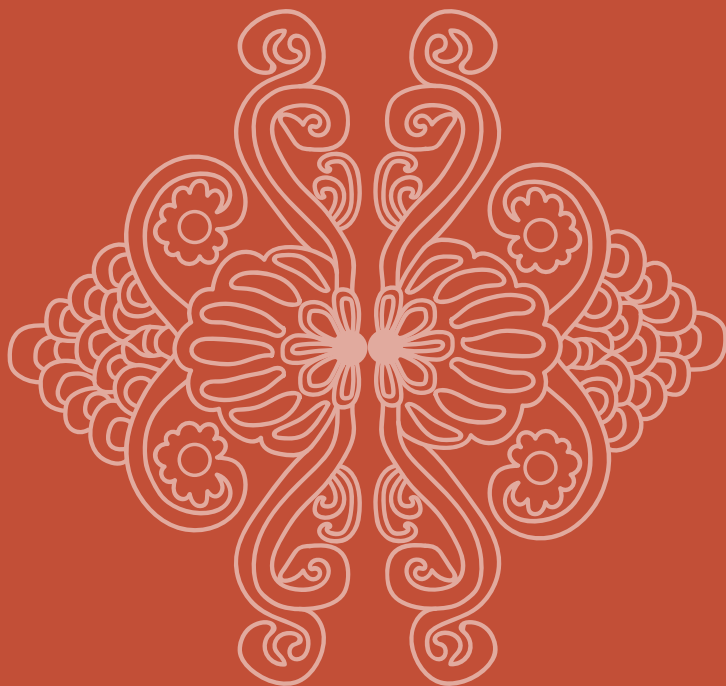
This study aims to analyze the role of Papatih Dalem in promoting Javanese values within Indonesia's national policies, employing the theoretical frameworks of symbolic power (Bourdieu), cultural diplomacy (Milton Cummings), and historical institutionalism. The Papatih Dalem functioned as an agent in transmitting values such as harmony (*rukun*), deliberation (*musyawarah*), and ethical leadership within the governance structure of the Yogyakarta Sultanate and explores how these values were adapted into national policies following Indonesia's independence.

The study finds that although the Papatih Dalem position no longer exists within the administrative structure of the Yogyakarta Sultanate, its cultural and symbolic legacy continues to influence contemporary governance in Indonesia. By preserving these traditional values, Indonesia can strengthen its local cultural identity in response to the challenges of globalization and modernization.

This study concludes that integrating local wisdom into national policies enhances Indonesia's cultural and political legitimacy, ensuring that tradition remains an inseparable part of state development.

Keywords: Papatih Dalem, cultural diplomacy, symbolic power, historical institutionalism, Javanese values.

Speakers Profiles





Bambang Muhamad Fasya Azhara, S.Hum.

Lahir di Purwakarta. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Pada tahun 2019 dirinya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengambil program studi Sejarah Peradaban Islam, dan menyelesaikan masa studi pada tahun 2023 dengan gelar Sarjana Humaniora.

Sejak tahun 2021, turut aktif dalam berbagai kegiatan edukatif dan pelestarian sejarah melalui komunitas *Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika* dibawah naungan Museum Konferensi Asia Afrika. Minat besarnya dalam sejarah, turut mengantarkanya menjadi salah satu pembicara dalam Simposium Internasional Budaya Jawa 2024 yang diselenggarakan oleh Kraton Yogyakarta.



Erma Purwati, S.S.

Lulusan sarjana Sastra Jawa dari Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015. Saat ini bekerja sebagai Pustakawan di Layanan Koleksi Naskah Nusantara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Karya tulis berupa buku di antaranya; 1. Alih Aksara *Serat Suluk Warni-Warni Sarta Serat Wirasat Wedalan Wanudya* tahun 2020, 2. Alih aksara dan Terjemahan Tarsan (*Wanara Seta*) jilid 1 tahun 2021, 3. Alih Bahasa *Kumpulan Ceritera* (AS 85) tahun 2022, 4. Alih Aksara *Damarwulan* (BR 380) tahun 2022, 5. Alih Aksara *Babad Banyumas KBG 526* tahun 2023, 6. Alih Bahasa *Dayasarana (Jampi)* Karangan Sutoprawiro-Tegal (*KBG 609*) tahun 2023, 7. Alih Bahasa *Ngelmu Bumi lan Katrangane Kapulowan Hindhi Wetan (NB 287)* Jilid I tahun 2024.



Associate Professor Dr. Muhammad Fazli Taib bin Saearani

Dr. Muhammad Fazli Taib Bin Saearani is an Associate Professor and the Dean of the Faculty of Music and Performing Arts at Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia.

A distinguished figure in dance education, he serves as the National Representative of Dance and the Child International (daCi). He is actively involved in academic research, contributing as the Chief Editor of the *Jurai Sembah Journal* and as a member of the editorial boards for the *Journal of Social Science* at UPSI and *Jurnal Kajian Seni* at Universitas Gadjah Mada.

Beyond academia, Associate Professor Dr. Muhammad Fazli has advised dance performances and festivals in Indonesia, Singapore, Thailand, China, and Slovenia. Engaged in consultancy, keynote speeches, and international conferences, he advocates for cultural heritage through dance, broadening the impact of dance education in Malaysia, Indonesia and internationally.

As a researcher, he has published over 30 academic papers on topics including dance inheritance, dance pedagogy, and creative movement education, with his work receiving national and international recognition. In acknowledgment of his contributions, he was awarded the *International Icon (Academician) Award* in 2024.

Expanding his academic influence, he has been appointed as a *Visiting Professor* at Universitas Negeri Semarang and has delivered *Guest Lectures* at the Performing Arts and Visual Arts Program at Universitas Gadjah Mada, as well as at Ningxia University, China. Through his extensive work, he continues to inspire the next generation of dance educators, scholars, and practitioners, ensuring the sustainability of dance as a vital part of cultural and educational landscapes.



Mastri Imammusadin, S.H.

Adalah seorang *fresh graduate* Fakultas Hukum UGM, saat ini aktif sebagai asisten peneliti pada Departemen Hukum Islam FH UGM. Minatnya pada studi hukum dan kebudayaan dimulai saat meneliti dinamika politik pada komunitas adat Samin di Blora yang telah diterbitkan dengan judul “Partisipasi Politik Seduler Sikep Blora dalam Pemilihan Umum Inklusif melalui Ajaran Kerukunan” (PKM Kemendikbud Ristek 2022). Penelitian lainnya yang pernah ia lakukan adalah “Implikasi Kompleksitas Pengaruh Dualisme Hukum Negara dan Adat Istiadat terhadap Tren Peningkatan Dispensasi Kawin di Kabupaten Purworejo” (Hibah URP FH UGM 2023), “Penggunaan Konsep *Bali Tabon* dalam Pembagian Harta Peninggalan Pewaris *Mafqud*: Interaksi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa” (Skripsi FH UGM 2024), dan “Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Pendekatan *Maqashid Al-Syari’ah* dalam Perspektif Hukum Positif” (2024). Ia juga aktif menjadi anggota ASEAN Writers Network dan terlibat dalam penulisan Buku “ASEAN Jembatan Pembangunan Dunia” yang saat ini masih dalam proses editing.

Selain aktif menulis, ia juga aktif dalam beberapa konferensi akademik, diantaranya pada Oktober 2024 lalu ia memaparkan penelitiannya yang berjudul “*Quo Vadis Sepikul Segendongan: Hukum Islam-Adat Dalam Ancaman Rasionalitas*” dan terpilih sebagai pembicara terbaik pada The 3rd Annual National Conference FSH UIN Sunan Kalijaga. Pada Desember 2024 lalu, ia juga terlibat sebagai pembicara dalam Graduate Conference Pacsa Sarjana UIN Sunan Kalijaga dengan paparannya yang berjudul “Keadilan Metafisik vs Keadilan Logis: Reformasi Paradigmatik Hukum Kewarisan Islam”.

Saat ini masih aktif berstatus sebagai santri di Pondok Pesantren Al Munawwir Kompleks Nurussalam, Krapyak, Yogyakarta. Dapat dihubungi pada WA email imammusadin99@gmail.com atau instagram [@imammusastro](https://www.instagram.com/imammusastro).



Dr. Hayu Adi Darmarastri, S.S., M.Hum.

Merupakan seorang perempuan yang lahir di Yogyakarta. Saat ini ia secara aktif menjadi staf pengajar di Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta sejak tahun 2009. Secara penuh menamatkan pendidikan S1 hingga S3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. S1 – Jurusan Sejarah FIB UGM, lulus 2001. S2 – Jurusan Sejarah Sekolah Pascasarjana UGM, lulus 2006. S3 – Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora FIB UGM, lulus 2020. Memiliki hobi membaca dan traveling, ia memiliki bidang peminatan terhadap sejarah sosial, sejarah perempuan, dan sejarah anak.



Nina Megawati, S.S., CSRS.

Adalah Sustainable Development Specialist, peneliti, dan penulis dengan lebih dari 13 tahun pengalaman di perusahaan multinasional sektor oil & gas, berkontribusi dalam sustainable development, ESG, dan community development, termasuk strategi keberlanjutan industri dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai pendiri KOBER Institute, ia memimpin berbagai inisiatif yang mengintegrasikan pendidikan, keberlanjutan, dan budaya, termasuk Econina yang mengembangkan ecoprint untuk ekonomi berkelanjutan, Drop Book Library untuk literasi, dan MEGACELLS untuk riset serta pelatihan berbasis keberlanjutan. Dengan pengalaman luas di industri, akademik, dan komunitas, Nina berkomitmen menghadirkan solusi inovatif dalam pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat.



Dr. Sn. R.M. Surtihadi, S.Sn., M.Sn.

Adalah Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sebagai dosen tetap, ia mengampu beberapa Mata Kuliah (MK) antara lain: Sejarah Musik, Sejarah Seni, Kondakting Orkestra, Praktik Instrumen Viola, dan Orkestra. Meraih gelar akademik Magister Seni pada 2006, di Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan meraih gelar Doktor Seni pada sekolah yang sama pada tahun 2023. Workshop dan Master Class yang pernah diikuti antara lain: ASEAN Youth Music Workshop (1991) Jakarta, (1993) Brunei Darrusalam; National Music Camp (1992) Mittagong, Australia; European-Indonesian Youth Music Camp, Yogyakarta (1992); Viola Master Class & Workshop oleh Oliver Scherke, Jerman (2000). Chamber Music Workshop: Cecilia Berzyick, USA, (1995), Sharon Eng, USA, (2002) & (2014). Aktivitas lain: Berpartisipasi dalam Studi Eksplorasi Seni & Sejarah Seni, Beijing (2011), Misi Kesenian ISI Yogyakarta, Montreal, Canada, (2012). Pelatih Orkestra Gita Bahana Nusantara 2011-2017, Dirigen Pendamping Orkestra & Paduan Suara Gita Bahana Nusantara 2013 & 2014. Dirigen Orkestra Harmoni Perekaman Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lokananta (2017). Dirigen Pendamping Orkestra & Paduan Suara Gita Bahana Nusantara pada Konser Akbar Merayakan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2017. Pada 2023 sebagai Kondakter Yogyakarta Royal Orchestra (YRO) dalam Konser Kemerdekaan RI ke-78, di samping itu juga terlibat dalam pertunjukan Yogyakarta Royal Orchestra dalam formasi ansambel gesek



Tiwuk Kusuma Hastuti, S.S., M.Hum.

Tiwuk Kusuma Hastuti, tiwukkusuma@staff.uns.ac.id, lahir di Sleman, meraih gelar Sarjana Sastra dari Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret tahun 1996, gelar Magister Humaniora dalam Ilmu Sejarah dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2007. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pengalaman kerja sebagai dosen di Prodi Ilmu Sejarah FIB UNS sejak tahun 2000, pernah menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi Penelitian dan Pengembangan Gender (P3G) LPPM UNS (2012-2015) dan Kaprodi Ilmu Sejarah (2015-2019). Penulis melakukan riset terkait agraria, ketahanan pangan dan gender. Beberapa artikel hasil riset dipublikasikan di jurnal internasional maupun disampaikan dalam seminar internasional antara lain: *The Empowerment of Rural Institution in the Attempt of Bringing Food Tenacity into Reality in Karanganyar Regency (2015)*, *Sende Land and the Dynamics of Economy and Culture in DIY (2016)*, *Sende Land and The Adaptation Strategy of Rural Communities in the Face of Economic Crisis in Yogyakarta in the XX Century (2017)*, *A Model for Mangrove Forest Management Based on Community Empowerment in Bantul Regency (2017)*, *Agrarian Reorganisation and Peasant Social Movement in Yogyakarta at The Beginning of Twentieth Century (2023)*, *The Agrarian Reorganization Impact to the Agrarian Structure of Sultanate Yogyakarta 1918-1942 (2024)*, dan lain-lain. Penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pengembangan pariwisata dan pemberdayaan anak.



Dr. Waskito Widi Wardoyo, S.S., M.A.

Setelah lulus dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS tahun 1999, prikelahiran Wonogiri ini sempat menjadi wartawan majalah bulanan di Jakarta. Setelah hampir lima tahun menekuni jurnalistik, -Widi-panggilan akrabnya- hijrah ke kota Solo

untuk menjadi pengajar di almamaternya pada akhir 2004. Menyelesaikan S3 Sejarah pada Departemen Sejarah FIB Undip pada Juni 2022 dengan disertasi bertemakan politik ekonomi, khususnya nasionalisasi kereta api. Hasil riset dan tulisan tentang nasionalisasi, kereta api serta konflik penguasaan lahan milik negara telah dipublikasikan. Dengan kepakarannya, bapaknya ini kerap diminta pandangannya untuk memberikan keterangan ahli terkait kepemilikan aset BUMN. Termasuk juga melakukan konsultasi serta penelusuran arsip kolonial baik di dalam maupun di luar negeri (Belanda) sebagai bagian dari upaya pengembalian aset negara.



Welda Sana Vero, S.Hum., M.A.

Welda Sana Vero, S. Hum, MA atau W. Sanavero is an acclaimed Indonesian author and cultural researcher, recognized for her evocative prose and short stories that explore the intersections of gender, culture, and societal transformation. She uses writing as a liberating tool to address complex themes such as love, humanity, social inequalities, and women's empowerment, expressed through poetic and metaphorical storytelling.

Her literary debut with *Perempuan yang Memesan Takdir* (2018), a bestseller published by Buku Mojok, Yogyakarta-Indonesia. This was followed by *Paragraf-Paragraf untuk Nurlela* (2020) with PATABA Press, Blora-Indonesia and *Perempuan yang Berjalan Sendirian* (2022) by Warning Books, Yogyakarta-Indonesia, *The Sounds of Silence* (2024) by The Paper Town Publishing, Kolkata-India, further establishing her as a compelling voice in Indonesian literature.

Supported by:



ROYAL AMBARRUKMO
YOGYAKARTA